



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian tahun anggaran 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sebagaimana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka tahun 2024 adalah merupakan tahun ketujuh bagi Dinas Pertanian dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Pertanian adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Dinas Pertanian atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan Dinas Pertanian disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian selama satu periode pelaporan.

Melalui Laporan Keuangan Dinas Pertanian, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.



Laporan Keuangan Dinas Pertanian memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Neraca;
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pertanian disusun berlandaskan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah



- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual.
 18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan – LRA
 - 3.1.2 Belanja
- 3.2 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Operasional
 - 3.2.1 Pendapatan – LO
 - 3.2.2 Beban
- 3.3 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas



3.4 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Neraca

3.4.1 Aset

3.4.2 Kewajiban

3.4.3 Ekuitas Dana

Bab IV Penjelasan atas informasi non keuangan Dinas Pertanian

Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan sebesar Rp.286.040.000,00 sama jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.283.000.000,00 atau tercapai 101,07 persen.
- 2) Realisasi Belanja sebesar Rp.70.591.647.152,00 lebih kecil Rp. 2.152.671.848,00 jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp. 72.744.319.000,00 atau tercapai 97,04 %.
- 3) Pada realisasi APBD tahun anggaran 2024 terjadi defisit sebesar Rp. 70.305.607.152,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp. 70.305.607.152,00.

	APBD Tahun 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	283.000.000,00	286.040.000,00	3.040.000,00
Belanja dan Transfer	72.744.319.000,00	70.591.647.152,00	2.152.671.848,00
Surplus/(Defisit)	(72.461.319.000,00)	(70.305.607.152,00)	2.155.711.848,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			-
Pengeluaran Pembiayaan			-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(72.461.319.000,00)	(70.305.607.152,00)	2.155.711.848,00

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023.

Dibandingkan dengan realisasi pada TA.2023, Pendapatan TA.2024 mengalami penurunan sebesar Rp.23.823.000,00 atau 7,68 persen. Belanja TA.2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.585.847.049,00 atau 15,71 persen, sedangkan SiKPA mengalami kenaikan Rp.9.585.847.049,00.



- 2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Belanja TA.2024 terealisasi sebesar 97.04 persen sedangkan realisasi belanja TA 2023 sebesar 96,47 persen. Adapun permasalahan dalam pencapaian target belanja TA.2024 terjadi pada pos Belanja Langsung. Hal ini antara lain disebabkan oleh:
1. Belanja langsung disebabkan
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.
 - Pelaksanaan kegiatan yang terkendala tidak sesuai jadwal karena menyesuaikan musim.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang:

- A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
- B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir
- C. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
- D. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir
- E. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- F. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

3.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebesar Rp.286.040.000,00 atau mencapai 101,07 persen dari target APBD Perubahan TA. 2024 sebesar Rp.283.000.000,00. Realisasi pendapatan TA. 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.23.823.000,00 atau 7,69 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2023. Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2024 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 286.040.000,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00; Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA.2024 adalah sebesar Rp. 70.591.647.152,00 atau 97,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2024 sebesar Rp. 72.744.319.000.00.

Realisasi Belanja Daerah TA.2024 mengalami kenaikan Rp 9.275.984.049,00 atau 15,13 persen jika dibandingkan dengan TA.2023, Realisasi Belanja Daerah TA.2024 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.69.553.344.052,00, Belanja Modal sebesar Rp 1.038.303.100,00 dan Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 286.040.000,00, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA.2024 sebesar (Rp.70.305.607.152,00). Terjadinya Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan



Netto mengakibatkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA.2024 sebesar (Rp. 70.305.607.152,,00).

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama TA. 2024 dan realisasi TA. 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

URAIAN	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	283.000.000,00	286.040.000,00	309.863.000,00
Pendapatan Transfer	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	283.000.000,00	286.040.000,00	309.863.000,00
Belanja			
Belanja Operasi	71.700.112.700,00	69.553.344.052,00	57.420.496.941,00
Belanja Modal	1.044.206.300,00	1.038.303.100,00	3.895.166.162,00
Belanja Tidak Terduga	-	-	-
Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja	72.744.319.000,00	70.591.647.152,00	61.315.663.103,00
Surplus/(Defisit)	(72.461.319.000,00)	(70.305.607.152,00)	(61.005.800.103,00)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Neto	-	-	-
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(72.461.319.000,00)	(70.305.607.152,00)	(61.005.800.103,00)

Uraian selengkapnya dari masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

3.1.1 PENDAPATAN-LRA.....Rp.286.040.000,00

Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebesar Rp.286.040.000,00 atau mencapai 101,07 persen dari target APBD Perubahan TA 2024 sebesar Rp.283.000.000,00. Realisasi Pendapatan-LRA TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.23.823.000,00 atau 7,69 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Penerimaan LRA TA 2024 serta realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	2024		2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pendapatan Asli daerah			
	Retribusi Jasa Usaha			
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	57.283.000,00
2	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	250.000.000,00	253.040.000,00	252.580.000,00
	Jumlah Belanja	283.000.000,00	286.040.000,00	309.863.000,00

**3.1.2. BELANJA– (LRA).....Rp. 70.591.647.152,00**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran/kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 70.591.647.152,00 yang berarti mencapai 97,04 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 72.744.319.000,00 berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2024 serta realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Belanja	2024		2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	71.700.112.700,00	69.553.344.052,00	57.420.496.941,00
2	Belanja Modal	1.044.206.300,00	1.038.303.100,00	3.895.166.162,00
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
4	Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja		72.744.319.000,00	70.591.647.152,00	61.315.663.103,00

1. BELANJA OPERASI.....Rp 69.553.344.052,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp.69.553.344.052,00 yang berarti mencapai 97,01 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.71.700.112.700,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi.

Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Belanja Operasi:	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	13.014.800.000,00	11.709.186.373,00	10.073.607.671,00
Belanja Barang dan Jasa	25.677.867.400,00	25.410.513.870,00	14.715.558.771,00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	33.007.445.300,00	32.433.643.809,00	32.631.330.499,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	71.700.112.700,00	69.553.344.052,00	57.420.496.941,00

**A. Belanja Pegawai.....Rp 11.709.186.373,00**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp 11.709.186.373,00 yang berarti mencapai 89,97 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.13.014.800.000,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai lebih besar Rp.1.635.578.702,00 atau 16,24 persen dari realisasi TA 2023.

Rincian Belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji dan Tunjangan	8.861.049.000,00	8.156.821.615,00	92,05	(704.227.385,00)
2	Tambahan Penghasilan ASN	3.971.719.000,00	3.371.834.728,00	84,90	(599.884.272,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	180.502.000,00	179.001.517,00	99,17	(1.500.483,00)
4	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.530.000,00	1.528.513,00	99,90	(1.487,00)
	Jumlah Belanja Pegawai	13.014.800.000,00	11.709.186.373,00	89,97	(1.305.613.627,00)

- 1) Realisasi Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.8.156.821.615,00 atau 92,05 persen dari anggarannya sebesar Rp 8.861.049.000,00. Terdiri dari :

No.	Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji Pokok	6.621.777.000,00	6.169.596.014,00	93,17	(452.180.986,00)
2	Tunjangan Keluarga	573.188.000,00	563.210.732,00	98,26	(9.977.268,00)
3	Tunjangan Jabatan	138.670.000,00	138.670.000,00	100,00	-
4	Tunjangan Fungsional	452.080.000,00	438.360.000,00	96,97	(13.720.000,00)
5	Tunjangan Fungsional Umum	20.580.000,00	18.360.000,00	89,21	(2.220.000,00)
6	Tunjangan Beras	376.720.000,00	365.576.160,00	97,04	(11.143.840,00)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	167.369.000,00	47.886.368,00	28,61	(119.482.632,00)
8	Pembulatan Gaji	126.000,00	91.953,00	72,98	(34.047,00)
9	Iuran Jaminan Kesehatan	444.039.000,00	363.581.976,00	81,88	(80.457.024,00)
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	19.500.000,00	13.448.890,00	68,97	(6.051.110,00)
11	Iuran Jaminan Kematian	47.000.000,00	38.039.522,00	80,94	(8.960.478,00)
	Jumlah Gaji dan Tunjangan	8.861.049.000,00	8.156.821.615,00	92,05	(704.227.385,00)

- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 3.371.834.728,00 atau 84,90 persen dari anggarannya sebesar Rp 3.971.719.000,00. Rincian Tambahan Penghasilan PNS secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:



No.	Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.971.719.000,00	3.371.834.728,00	84,90	(599.884.272,00)
Jumlah		3.971.719.000,00	3.371.834.728,00	84,90	(599.884.272,00)

- 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp 166.380.000,00 atau 99,11 persen dari anggarannya sebesar Rp 167.880.000.000,00. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

No.	Tamabahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.622.000,00	12.621.517,00	100,00	(483,00)
2	Belanja Honorarium	167.880.000,00	166.380.000,00	99,11	(1.500.000,00)
Jumlah		180.502.000,00	179.001.517,00	99,17	(1.500.483,00)

- 4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp 1.528.513,00 atau 99,90 persen dari anggarannya sebesar Rp 1.530.000,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

No.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Insentif bagi KDH./WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	1.530.000,00	1.528.513,00	99,90	(1.487,00)
Jumlah		1.530.000,00	1.528.513,00	99,90	(1.487,00)

B. Belanja Barang dan Jasa.....Rp25.410.513.870,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp.25.410.513.870,00 yang berarti mencapai 98,96 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.25.677.867.400,00. Hal ini berarti Belanja Barang dan Jasa lebih besar Rp.10.694.955.099,00



atau 72,68 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp. 14.715.558.771,00.

Belanja Barang dan Jasa terdiri atas belanja sebagai berikut:

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Barang	4.158.646.760,00	4.121.432.394,00	99,11	(37.214.366,00)
2	Belanja Jasa	3.453.066.640,00	3.288.895.026,00	95,25	(164.171.614,00)
3	Belanja Pemeliharaan	950.280.000,00	940.039.001,00	98,92	(10.240.999,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas	2.062.674.000,00	2.006.947.449,00	97,30	(55.726.551,00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.053.200.000,00	15.053.200.000,00		-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		25.677.867.400,00	25.410.513.870,00	98,96	(267.353.530,00)

1. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp 4.121.432.394,00 atau 99,11 persen dari anggarannya sebesar Rp.4.158.646.760,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: :



No.	Belanja Barang Pakai Habis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.039.600,00	5.039.600,00	100,00	-
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.711.000,00	22.561.924,00	99,34	(149.076,00)
3	Belanja Bahan-Bahan Bibit/Tanaman	684.832.200,00	673.240.000,00	98,31	(11.592.200,00)
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	170.808.900,00	170.268.900,00	99,68	(540.000,00)
5	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - ATK	891.862.560,00	884.985.050,00	99,23	(6.877.510,00)
6	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Kertas dan Cover	94.847.500,00	80.606.000,00	84,98	(14.241.500,00)
7	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Bahan Komputer	49.630.000,00	48.590.000,00	97,90	(1.040.000,00)
8	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Perabot Kantor	36.195.000,00	36.167.000,00	99,92	(28.000,00)
9	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Alat Listrik	58.262.800,00	58.063.200,00	99,66	(199.600,00)
10	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Perlengkapan Dinas	122.250.000,00	121.770.000,00	99,61	(480.000,00)
11	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Suvenir/Cendera Mata	11.760.000,00	11.340.000,00	-	(420.000,00)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Alat/Bahan untuk Keg. Kantor Lainnya	114.134.500,00	114.134.500,00	100,00	-
13	Belanja Natura dan Pakan-Natura	214.995.700,00	214.641.500,00	99,84	(354.200,00)
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.290.637.000,00	1.290.154.720,00	99,96	(482.280,00)
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	68.055.000,00	68.055.000,00	100,00	-
16	Belanja Pakaian Olahraga	322.625.000,00	321.815.000,00	99,75	(810.000,00)
Jumlah Belanja Barang Pakai Habis		4.158.646.760,00	4.121.432.394,00	99,11	(37.214.366,00)

2. Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp 3.288.895.026,00 atau 95,25 persen dari anggarannya sebesar Rp 3.453.066.640,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam table berikut :



No.	Belanja Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Kantor	2.175.868.640	2.037.670.516	94	(138.198.124,00)
2	Belanja Sewa Tanah	8.000.000	8.000.000	100	-
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	249.980.000	248.128.560	99	(1.851.440)
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	43.113.000	42.931.200	100	(181.800)
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	923.945.000	900.363.750	97	(23.581.250)
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.960.000	50.601.000	99	(359.000)
7	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.200.000	1.200.000	100	-
Jumlah Belanja Jasa		3.453.066.640	3.288.895.026	95	(164.171.614)

- 1) Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 2.037.670.516,00 atau 93,65 persen dari anggarannya sebesar Rp 2.175.868.640,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :



No.	Belanja Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yg tidak menghasilkan Pendapatan	14.400.000	14.400.000	100	-
2	Honorarium Narasumber , Moderator	147.160.000	121.590.000	83	(25.570.000)
3	Honorarium Penyuluhan / Pendampingan	123.600.000	123.550.000	100	(50.000)
4	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	660.000	660.000	100	-
5	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.500.000	2.500.000	100	-
6	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.550.000	20.550.000	100	-
7	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	388.000.000	388.000.000	100	-
8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	239.208.750	225.018.750	94	(14.190.000)
9	Belanja Jasa Tenaga Operator	78.255.000	68.355.000	87	(9.900.000)
10	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.000.000	8.000.000	100	-
11	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	332.080.000	326.760.000	98	(5.320.000)
12	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	230.250.000	208.850.000	91	(21.400.000)
13	Belanja Jasa Tenaga Supir	15.120.000	14.280.000	94	(840.000)
14	Belanja Jasa Juri	1.500.000	1.500.000	100	-
15	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	88.820.000	85.520.000	96	(3.300.000)
16	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.900.000	16.809.000	99	(91.000)
17	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan	7.400.000	7.360.000	99	(40.000)
18	Belanja Tagihan Telpon	2.500.000	860.409	34	(1.639.591)
19	Belanja Tagihan Air	9.660.000	5.124.600	53	(4.535.400)
20	Belanja Tagihan Listrik	294.204.890	275.794.815	94	(18.410.075)
21	Belanja Langganan Jurnal/Surat	12.600.000	9.120.000	72	(3.480.000)
22	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	142.500.000	113.067.942	79	(29.432.058)
Jumlah Belanja Jasa		2.175.868.640	2.037.670.516	94	(138.198.124)

- 2) Realisasi Belanja Sewa Tanah sebesar Rp 8.000.000,00 atau 100 persen dari anggarannya sebesar Rp 8.000.000,00 .Belanja Sewa Tanah terdiri dari Belanja Sewa Tanah Pertanian.
- 3) Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 248.128.560,00 atau 99,26 persen dari anggarannya sebesar Rp 249.980.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



No.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	165.000.000,00	163.482.960,00	99,08
2	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam	17.500.000,00	17.265.000,00	98,66
3	Belanja Sewa Mobil	7.000.000,00	6.993.000,00	99,90
4	Belanja Sewa Peralatan Umum	60.480.000,00	60.387.600,00	99,85
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		249.980.000,00	248.128.560,00	99,26

- 4) Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 42.931.200,00 atau 99,58 persen dari anggarannya sebesar Rp 43.113.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.113.000,00	13.047.800,00	99,50	(65.200,00)
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	29.883.400,00	99,61	(116.600,00)
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan		43.113.000,00	42.931.200,00	-	(181.800,00)

- 5) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.900.363.750,00 atau 97,45 persen dari anggarannya sebesar Rp.923.945.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	483.300.000,00	470.163.750,00	97,28	(13.136.250,00)
2	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	102.670.000,00	99.956.000,00	97,36	(2.714.000,00)
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	337.750.000,00	330.019.000,00	97,71	(7.731.000,00)
4	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	225.000,00	225.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		923.945.000,00	900.363.750,00	97,45	(23.581.250,00)



- 6) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp 50.601.000,00 atau 99,30 persen dari anggarannya sebesar Rp.50.960.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika	50.960.000,00	50.601.000,00	99,30	(359.000,00)
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	-	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		50.960.000,00	50.601.000,00	99,30	(359.000,00)

- 7) Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.1.200.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp 1.200.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

No.	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi BinteK	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-
2	Belanja Sosialisasi	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi BinteK		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-

3. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 940.039.001,00 atau 98,92 persen dari anggarannya sebesar Rp 950.280.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	217.730.000,00	208.872.201,00	95,93	(8.857.799,00)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	732.550.000,00	731.166.800,00	99,81	(1.383.200,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan		950.280.000,00	940.039.001,00	98,92	(10.240.999,00)



4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.006.947.449,00 atau 97,30 persen dari anggarannya sebesar Rp.2.062.674.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.145.854.000,00	1.135.664.949,00	99,11	(10.189.051,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	622.600.000,00	582.937.500,00	93,63	(39.662.500,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	89.520.000,00	88.640.000,00	99,02	(880.000,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	204.700.000,00	199.705.000,00	97,56	(4.995.000,00)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		2.062.674.000,00	2.006.947.449,00	97,30	(55.726.551,00)

5. Realisasi Belanja Uang dan / atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat sebesar Rp. 15.053.200.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp. 15.053.200,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

No.	Belanja Uang dan Barang /Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	-
2	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	15.050.000.000,00	15.050.000.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Uang dan Barang /Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat		15.053.200.000,00	15.053.200.000,00	100,00	-

C. Belanja Hibah.....Rp. 32.433.643.809,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp.32.433.643.809,00 yang berarti mencapai 98,62 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.33.007.445.300,00. Hal ini berarti Belanja Hibah lebih kecil Rp.197.686.690.00 atau 0,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp. 32.631.330.499,00. Belanja Hibah terdiri atas belanja Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba , Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.



Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Uang dan Barang /Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Hibah Barang	33.768.896.200,00	32.631.330.499,00	96,63	(1.137.565.701,00)
Jumlah Belanja Uang dan Barang /Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat		33.768.896.200,00	32.631.330.499,00	96,63	(1.137.565.701,00)

2. BELANJA MODAL.....Rp 1.038.303.100,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp 1.038.303.100,00 atau 99,43 persen dari anggarannya sebesar Rp 1.044.206.300,00.

Realisasi belanja modal terdiri dari:

No.	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	551.606.600,00	548.756.400,00	99,48	(2.850.200,00)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.199.700,00	298.974.700,00	99,59	(1.225.000,00)
3	Belanja Modal Jalan , Jaringan dan Irigasi	192.400.000,00	190.572.000,00	99,05	(1.828.000,00)
Jumlah Belanja Modal		1.044.206.300,00	1.038.303.100,00	99,43	(5.903.200,00)

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 548.756.400,00 atau 99,48 persen dari anggarannya sebesar Rp 551.606.600,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



No.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	513.476.200,00	510.900.100,00	99,50	(2.576.100,00)
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	9.718.000,00	9.600.000,00	98,79	(118.000,00)
3	Belanja Modal Personal Komputer	28.412.400,00	28.256.300,00	99,45	(156.100,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		551.606.600,00	548.756.400,00	99,48	(2.850.200,00)

- 2) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 298.974.700,00 atau 99,59 persen dari anggarannya sebesar Rp 300.199.700,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Kantor	300.199.700,00	298.974.700,00	99,59	(1.225.000,00)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		300.199.700,00	298.974.700,00	99,59	(1.225.000,00)

- 3) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.190.572.000,00 atau 99,05 persen dari anggarannya sebesar Rp.192.400.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	192.400.000,00	190.572.000,00	99,05	(1.828.000,00)
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		192.400.000,00	190.572.000,00	-	(1.828.000,00)

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Pada tahun anggaran



2024 belanja yang menghasilkan aset hanya berasal dari belanja modal saja, tidak terdapat kapitalisasi dari belanja pegawai. Sedangkan belanja yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp.0,00. Dihilangkan kepada masyarakat sebesar Rp.0,00 dan tidak ada belanja aset dengan nilai dibawah satuan minimal kapitalisasi aset tetap.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).....(Rp 70.305.607.152,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, Pendapatan Daerah sebesar Rp 286.040.000,00 lebih kecil dibandingkan Belanja Daerah sebesar Rp 70.591.647.152,00 sehingga terjadi defisit atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp 70.305.607.152,00.

Rincian SiKPA sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan	283.000.000,00	286.040.000,00	309.863.000,00
	Belanja dan Transfer	72.744.319.000,00	70.591.647.152,00	61.315.663.103,00
	Surplus/(Defisit)	(72.461.319.000,00)	(70.305.607.152,00)	(61.005.800.103,00)
2	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	-	-	-
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(72.461.319.000,00)	(70.305.607.152,00)	(61.005.800.103,00)



3. 2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) operasional Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2024.

1. PENDAPATAN-LO.....Rp 286.040.000,00

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2024 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
- Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan-LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	286.040.000,00	309.863.000,00	(23.823.000,00)
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	-	-	-
4	Surplus Non Operasional-LO	-	-	-
5	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan-LO		286.040.000,00	309.863.000,00	(23.823.000,00)

Realisasi pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp 286.040.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 309.863.000,00 atau 7,69 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan-LO tahun 2023.



1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.....Rp 286.040.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	286.040.000,00	309.863.000,00	(23.823.000,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	-	-
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		286.040.000,00	309.863.000,00	(23.823.000,00)

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp.286.040.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 309.863.000,00 atau 7,69 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023.

Sedangkan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO, pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00, karena Dinas Pertanian bukan merupakan pengelola pajak daerah.
2. Pendapatan Retribusi-LO tahun 2024 sebesar Rp.286.040.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.23.823.000,00 atau 7,69 persen jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi-LO pada tahun 2023. Realisasi Retribusi-LO tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - LO	33.000.000,00	57.283.000,00	(24.283.000,00)
2	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah - LO	253.040.000,00	252.580.000,00	460.000,00
Jumlah		286.040.000,00	309.863.000,00	(23.823.000,00)

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp 0,00 karena Dinas Pertanian bukan merupakan pengelola Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp 0,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023.



1.2 **Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 sebesar Rp 0,00** karena Dinas Pertanian bukan merupakan Pengelola Pendapatan Transfer.

1.3 **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp 0,00** karena Dinas Pertanian bukan pengelola Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1.4 **Surplus Non Operasional-LO tahun 2024 sebesar Rp 0,00.** Dinas Pertanian tidak mengelola Surplus Non Operasional.

2. BEBAN-LO.....Rp 70.948.972.079,34

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar

- Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang,
- Nilai aset yang dikonsumsi,
- Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi beban-LO tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Beban	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	69.434.099.207,90	57.553.405.309,30	11.880.693.898,60
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.514.872.871,44	1.490.867.121,40	24.005.750,04
	Jumlah	70.948.972.079,34	59.044.272.430,70	11.904.699.648,64

Beban-LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11.904.699.648,64 atau 20,16 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2023. Dalam penjelasan CaLK tentang Beban-LO berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

2.1 Beban Operasi.....Rp 69.434.099.207,90

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan lain-lain. Beban Operasi tahun 2024 sebesar Rp 69.434.099.207,90 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.880.693.898,60 atau 20,64 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2023.



Untuk lebih jelasnya, Beban Operasi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Beban	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
a	Beban Pegawai - LO	11.593.225.520,00	10.189.568.524,00	1.403.656.996,00
b	Beban Barang dan Jasa	10.357.229.878,90	7.882.506.286,30	2.474.723.592,60
c	Beban Hibah	47.483.643.809,00	39.481.330.499,00	8.002.313.310,00
	Jumlah	69.434.099.207,90	57.553.405.309,30	11.880.693.898,60

- a. **Beban Pegawai-LO** tahun 2024 sebesar Rp 11.593.225.520,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.403.656.996,00 atau 13,78 persen jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Beban Pegawai - LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	8.040.860.762,00	6.614.819.407,00	1.426.041.355,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	3.371.834.728,00	3.421.241.617,00	(49.406.889,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	179.001.517,00	151.814.080,00	27.187.437,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH -LO	1.528.513,00	1.693.420,00	(164.907,00)
	Jumlah	11.593.225.520,00	10.189.568.524,00	1.403.656.996,00

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp 11.709.186.373,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp 11.593.225.520,00. Terdapat selisih Rp 115.960.853,00 yaitu terdiri dari Utang Beban Pegawai Tahun Sebelumnya yang dibayarkan di Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya, selisih belanja pegawai LRA dan beban pegawai LO dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Belanja Pegawai LRA ke Beban Pegawai-LO

No	Beban Persediaan	LRA	Debet	Kredit	Beban LO
			Jumlah	Jumlah	
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	8.156.821.615,00	-	115.960.853,00	8.040.860.762,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	3.371.834.728,00	-	-	3.371.834.728,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	179.001.517,00	-	-	179.001.517,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH -LO	1.528.513,00	-	-	1.528.513,00
	Jumlah	11.709.186.373,00	-	115.960.853,00	11.593.225.520,00

**Belanja Pegawai LRA ke Beban Pegawai-LO**

No	Beban Pegawai	Kredit			
		Utang Beban Pegawai th.2024	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	Reklas Beban	Jumlah
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	-	-	-	-
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	-	-	-	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	-	-	-	-
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH -LO	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Belanja Pegawai LRA ke Beban Pegawai-LO

Belanja Pegawai		Kredit				
No	Belanja Pegawai	Utang Beban Pegawai Tahun Sebelumnya	Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Tetap	Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Lain	Reclas Beban	Jumlah
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	115.960.853,00	-	-	-	115.960.853,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO					
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	-	-			-
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH -LO		-	-	-	-
Jumlah		115.960.853,00	-	-	-	115.960.853,00

- b. **Beban Barang dan Jasa** tahun 2024 sebesar Rp.10.357.229.878,90 mengalami penurunan sebesar Rp 2.474.723.592,60 atau 31,40 persen jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Beban Barang dan Jasa - LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Persediaan	4.118.705.447,90	2.777.989.676,30	1.340.715.771,60
2	Beban Jasa	3.288.337.981,00	2.454.484.045,00	833.853.936,00
3	Beban Pemeliharaan	940.039.001,00	993.037.185,00	(52.998.184,00)
4	Beban Perjalanan Dinas	2.006.947.449,00	1.656.995.380,00	349.952.069,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.200.000,00	-	3.200.000,00
Jumlah		10.357.229.878,90	7.882.506.286,30	2.474.723.592,60



b.1.Beban Persediaan-LO tahun 2024 sebesar Rp 4.118.705.447,90 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.340.715.771,60 atau 48,26 persen jika dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Persediaan - LO				
No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang Pakai Habis	4.118.705.447,90	2.777.989.676,30	1.340.715.771,60
Jumlah		4.118.705.447,90	2.777.989.676,30	1.340.715.771,60

Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp 4.121.432.394,00 sedangkan Beban Persediaan-LO sebesar Rp. 4.118.705.447,90. Jadi terdapat selisih antara Belanja Persediaan- LRA dan Beban Persediaan-LO sebesar Rp.2.726.946,10 yang dikarenakan adanya :

1. Pemakaian persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp. 40.398.573,90 yang menambah beban persediaan-LO.
2. Adanya persediaan akhir tahun 2024 sebesar Rp.43.125.520 yang mengurangi beban persediaan-LO.

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO					
No	Beban Persediaan	LRA	Debit	Kredit	Beban LO
1	Beban Bahan Pakai Habis	4.121.432.394,00	40.398.573,90	43.125.520,00	4.118.705.447,90
Jumlah		4.121.432.394,00	40.398.573,90	43.125.520,00	4.118.705.447,90

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

No	Beban Persediaan	Debet			
		Pemakaian Persediaan th.2023	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	Reclas Beban	Jumlah
1	Beban Bahan Pakai Habis	32.818.573,90	7.580.000,00	-	40.398.573,90
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	-	-	-	-
3	Beban Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak	-	-	-	-
Jumlah		32.818.573,90	7.580.000,00	-	40.398.573,90



Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO						
No	Belanja Persediaan	Kredit				
		Persediaan th.2024	Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Tetap	Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Lain	Reclas Beban	Jumlah
1	Beban Barang Pakai Habis	29.145.520,00	13.980.000,00	-	-	43.125.520,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material		-			-
3	Beban Cetak dan Penggandaan		-	-	-	-
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak	-			-	-
Jumlah		29.145.520,00	13.980.000,00	-	-	43.125.520,00

b.2 Beban Jasa-LO tahun 2024 sebesar Rp.3.288.337.981,00 mengalami penurunan sebesar Rp.833.853.936,00 atau 33,97 persen jika dibandingkan dengan Beban-Jasa LO tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Jasa - LO				
No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Jasa Kantor	2.037.113.471,00	1.663.242.325,00	373.871.146,00
2	Beban Sewa Tanah	8.000.000,00	-	8.000.000,00
3	Beban Sewa Sarana Peralatan dan Mesin	248.128.560,00	167.851.200,00	80.277.360,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	42.931.200,00	-	42.931.200,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	900.363.750,00	152.118.000,00	748.245.750,00
6	Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	50.601.000,00	451.122.520,00	(400.521.520,00)
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.200.000,00	20.150.000,00	(18.950.000,00)
Jumlah		3.288.337.981,00	2.454.484.045,00	833.853.936,00

Belanja Jasa-LRA sebesar Rp.3.288.895.026,00 sedangkan Beban Jasa-LO sebesar Rp.3.288.337.981,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp.1557.045,00 yang dikarenakan karena :

1. Utang Jasa selama tahun 2024 sebesar Rp 35.904.318,00 yang menambah beban jasa-LO.
2. Utang beban tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 36.461.363,00 yang mengurangi beban jasa-LO.



Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO

No	Uraian	LRA	Debet	Kredit	LO
			Jumlah	Jumlah	
1	Beban Jasa Kantor	2.037.670.516,00	35.904.318,00	36.461.363,00	2.037.113.471,00
2	Beban Sewa Tanah	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	248.128.560,00	-	-	248.128.560,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	42.931.200,00	-	-	42.931.200,00
5	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	900.363.750,00	-	-	900.363.750,00
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.601.000,00	-	-	50.601.000,00
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
Jumlah		3.288.895.026,00	35.904.318,00	36.461.363,00	3.288.337.981,00

Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO

No	Uraian	Debet				Jumlah
		Pemakaian Persediaan th.2024	Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2024	Belanja modal yg tidak dikapitalisasi	Reclas Beban Debet	
1	Beban Jasa Kantor		35.904.318,00	-		35.904.318,00
2	Beban Sewa Tanah				-	-
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin					-
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan					-
5	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi					-
6	Beban Jasa Konsultansi Non					-
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					-
Jumlah		-	35.904.318,00	-	-	35.904.318,00

**Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO**

No	Uraian	Kredit					Jumlah
		persediaan akhir tahun 2023	Utang Beban tahun sebelumnya yg dibayar tahun 2024	Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap	Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Lain	Reklas Beban Kredit	
1	Beban Jasa Kantor	-	36.461.363,00			-	36.461.363,00
2	Beban Sewa Tanah					-	-
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin						-
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan						-
5	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi						-
6	Beban Jasa Konsultasi Non						-
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						-
Jumlah		-	36.461.363,00	-	-	-	36.461.363,00

b.3 Beban Pemeliharaan-LO tahun 2024 sebesar Rp.940.039.001,00 mengalami penurunan sebesar Rp.52.998.184,00 atau 5,34 persen jika dibandingkan dengan Beban-Pemeliharaan LO tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Pemeliharaan - LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	208.872.201,00	150.161.462,00	58.710.739,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	731.166.800,00	842.875.723,00	(111.708.923,00)
Jumlah		940.039.001,00	993.037.185,00	(52.998.184,00)

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp.940.039.001,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp. 940.039.001,00. Tidak terdapat selisih antara Belanja Pemeliharaan- LRA dan Beban Pemeliharaan-LO.

b.4 Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2024 sebesar Rp 2.006.947.449,00 mengalami kenaikan Rp.349.952.069,00 atau 21,12 persen jika dibandingkan dengan Beban-Perjalanan Dinas-LO tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Beban Perjalanan Dinas - LO**

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	582.937.500,00	449.500.000,00	133.437.500,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.135.664.949,00	1.207.495.380,00	(71.830.431,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	88.640.000,00	-	88.640.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota	199.705.000,00	-	199.705.000,00
Jumlah		2.006.947.449,00	1.656.995.380,00	349.952.069,00

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp. 2.006.947.449,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas -LO sebesar Rp. 2.006.947.449,00. Jadi tidak terdapat selisih.

Beban Perjalanan Dinas LRA ke LO

No	Uraian	LRA	Belanja modal yg tdk dikapitalisasi	Reklas Beban Debet	Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap dan	Reklas Beban Kredit	LO
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	582.937.500,00	-	-	-	-	582.937.500,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.135.664.949,00	-	-	-	-	1.135.664.949,00
3	Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam	88.640.000,00	-	-	-	-	88.640.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Meeting Luar K	199.705.000,00	-	-	-	-	199.705.000,00
Jumlah		2.006.947.449,00	-	-	-	-	2.006.947.449,00

c. **Beban bunga** tahun 2024 sebesar Rp 0,00

d. **Beban Subsidi** tahun 2024 sebesar Rp 0,00

e. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat** tahun 2024 sebesar Rp 3.200.000,00 yang berasal dari Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan.

f. **Beban Hibah** tahun 2024 sebesar Rp. 47.483.643.809,00 mengalami kenaikan sebesar 20,27% jika dibandingkan dengan Beban Hibah pada tahun 2023 sebesar Rp 39.481.330.499,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Beban Hibah - LO				
No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	15.050.000.000,00	6.850.000.000,00	8.200.000.000,00
2	Beban hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	32.433.643.809,00	32.631.330.499,00	(197.686.690,00)
Jumlah		47.483.643.809,00	39.481.330.499,00	8.002.313.310,00

Beban hibah tahun 2024 terdapat Reklas Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) menjadi Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp 15.050.000.000,00.

g. **Beban Bantuan Sosial** tahun 2024 sebesar Rp.0,00 tetap sama dengan tahun 2023 sebesar Rp 0,00.

h. **Beban Penyusutan dan Amortisasi** tahun 2024 sebesar Rp.1.514.872.871,44 mengalami kenaikan sebesar Rp.24.005.750,04 atau 1,61 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.490.867.121,40.

**Beban Penyusutan Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan kendaraan dinas bermotor perorangan	53.428.571,43
2	Beban Penyusutan kendaraan bermotor beroda tiga	11.626.131,00
3	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/ Ternak	15.202.883,00
4	Beban Penyusutan Alat Prosesing	8.300.000,00
5	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.025.175,36
6	Beban Penyusutan alat kantor lainnya	9.769.666,67
7	Beban Penyusutan meubelair	7.286.776,63
8	Beban Penyusutan alat pendingin	57.464.333,31
9	Beban Penyusutan alat dapur	1.212.583,34
10	Beban Penyusutan alat rumah tangga lainnya (home use)	59.801.939,16
11	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	1.121.399,81
12	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	34.822.800,00
13	Beban Penyusutan Peralatan studioVideo dan Film	30.592.500,00
14	Beban Penyusutan Sumber Tenaga	38.668.300,00
15	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik	206.250,00
16	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	524.475,00
17	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	3.600.625,00
18	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	13.437.131,25
19	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	1.193.333,32
20	Beban Penyusutan Personal Komputer	347.446.527,19
21	Beban Penyusutan Peralatan Mini Komputer	16.232.343,33
22	Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer	10.489.798,00
23	Beban Penyusutan Heat Generating Equipment	3.749.375,00
24	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	197.870.792,84
25	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	106.538.042,55
26	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	14.227.690,00
27	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	13.863.944,20
28	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.977.600,00
29	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.267.163,15
30	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/	8.054.745,00
31	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	5.687.820,00
32	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.491.522,00
33	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.960.420,00
34	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	303.400,00
35	Beban Penyusutan Taman	6.351.411,17
36	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.534.772,00
37	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	12.867.004,43
38	Beban Penyusutan bangunan Tugu	3.914.297,00
39	Beban Penyusutan bangunan pagar	56.779.585,77
40	Beban Penyusutan Jalan Khusus	225.921.346,02
41	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi	31.146.996,41
42	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	2.740.000,00
43	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.177.500,00
44	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	11.842.879,60
45	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	4.973.525,00
46	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.177.496,50
Jumlah		1.514.872.871,44

i. **Beban Penyisihan Piutang** tahun 2024 sebesar Rp. 0,00.

j. **Beban Lain-lain** tahun 2024 sebesar Rp 00,00

2.2 **Beban Transfer.....Rp.0,00**

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp 0,00. Karena Dinas Pertanian bukan merupakan SKPD Pengelola Beban Transfer.

**2.3 Defisit Non Operasional.....Rp.0,00**

Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, Defisit dari kegiatan Non Operasional-LO.

Defisit Non Operasional-LO tahun 2024 sebesar Rp.0,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan Defisit Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp. 26.274.049,65. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Beban Transfer	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
a	Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	-	26.131.966,32	(26.131.966,32)
b	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-
c	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	-	142.083,33	(142.083,33)
	Jumlah	-	26.274.049,65	(26.274.049,65)

- Defisit Penjualan Aset Non Lancar merupakan nilai buku dari asset tetap yang dihapuskan selama tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 26.131.966,32 atau 100,00 persen jika dibandingkan dengan Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2023.
- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp 0,00
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp.142.083,33 atau 100,00 persen jika dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023

2.4 Beban Luar Biasa.....Rp.0,00

Beban Luar Biasa Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 0,00

SURPLUS/(DEFISIT)-LO.....(Rp.70.662.932,079,34)

Surplus / Defisit – LO diperoleh dari Jumlah Pendapatan LO dikurangi Beban LO SKPD. Pada tahun 2024, dengan Pendapatan SKPD sebesar Rp.286.040.000,00, Beban LO SKPD sebesar Rp.70.948.972.079,34 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional SKPD sebesar Rp.0,00, maka diperoleh Defisit LO SKPD Tahun 2024 sebesar (Rp.70.662.932.079,34).

3.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal tahun 2024, penambahan surplus atau pengurangan defisit yang berasal dari Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun



pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal : Pada tahun 2024 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp.29.931.912.483,84 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.
2. Surplus/defisit adalah defisit yang berasal dari Laporan Operasional Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar Rp.70.662.932.079,34
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi yang langsung mengurangi Ekuitas, antara lain berasal dari Koreksi Ekuitas pada tahun 2024 sebesar Rp. 0,00
4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp.70.305.607.152,00
Akun kewajiban untuk dikonsolidasikan (R/K SKPD) menggambarkan transfer dari Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2024. Penambahan akun R/K PPKD SKPD apabila menerima transfer aset seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemerintah Daerah serta pelaksanaan belanja LS (SP2D LS). Pengurangan R/K PPKD SKPD apabila SKPD transfer aset ke Pemerintah Daerah (penyetoran aset ke Pemerintah Daerah). Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 jumlah R/K PPKD pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 70.305.607.152,00
5. Ekuitas Akhir : terdapat saldo ekuitas akhir sebesar Rp. 29.574.587.556,50.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perubahan Ekuitas		
Uraian	2024	2023
Ekuitas Awal	29.931.912.483,84	27.686.795.861,19
Surplus/Defisit-LO	(70.662.932.079,34)	(58.760.541.397,02)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Ekuitas	-	(142.083,33)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	70.305.607.152,00	61.005.800.103,00
Ekuitas Akhir	29.574.587.556,50	29.931.912.483,84

**3.4. NERACA**

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan Neraca Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam Rupiah) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	29.145.520,00	32.818.573,90
Investasi Jangka Panjang		
Aset Tetap	29.552.168.221,55	30.022.337.992,99
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	29.178.132,95	29.178.132,95
Jumlah Aset	29.610.491.874,50	30.084.334.699,84
Kewajiban Jangka Pendek	35.904.318,00	152.422.216,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	35.904.318,00	152.422.216,00
Jumlah Ekuitas	29.574.587.556,50	29.931.912.483,84
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	29.610.491.874,50	30.084.334.699,84

Penjelasan dari masing-masing pos neraca diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.7. ASET.....Rp.29.610.491.874,50

Nilai Aset SKPD Dinas Pertanian per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 30.084.334.699,84, sedangkan nilai asset per 31 Desember 2024 sebesar Rp.29.610.491.874,50. Adapun mutasi dari asset tersebut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Aset LancarRp. 29.145.520,00

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat diperinci sebagai berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1 Kas di Bendahara Penerimaan		
2 Kas di Bendahara Pengeluaran		
3 Kas di BLUD		
4 Kas di Bendahara FKTP		
5 Kas di Bendahara Bos		
6 Kas di Bendahara Dana Bos		
7 Setara Kas		
8 Investasi Jangka Pendek		
9 Piutang Pendapatan		
10 Piutang Lainnya		
11 Penyisihan Piutang		
12 Beban Dibayar Dimuka		
13 Persediaan	29.145.520,00	32.818.573,90
Jumlah	29.145.520,00	32.818.573,90

**1. Kas.....Rp. 0,00**

Saldo kas pada Neraca SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Dana Bos. Kas pada Neraca tersebut dapat diperincian sebagai berikut:

<i>Kas</i>	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	-	-
Kas di Bendahara FKTP	-	-
Kas di Bendahara Dana BOS	-	-
Jumlah	-	-

a) Kas di Bendahara Pengeluaran.....Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas (uang) tunai maupun jumlah Kas yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2024. Kas di Bendahara pengeluaran tahun 2023 sebesar Rp.0,00, adapun pada tahun 2024 saldo kas di bendahara pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 0,00 sebagaimana tabel berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas Di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

b) Kas di Bendahara Penerimaan.....Rp.0,00

Pada tahun 2024 kas bendahara penerimaan sebesar Rp.0,00.

2. Piutang Pendapatan.....Rp.0,00

Pada tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan terdapat Piutang Pendapatan sebesar Rp.0,00

3. Piutang LainnyaRp 0,00

Pada tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tidak terdapat Piutang Lainnya.

4. Persediaan.....Rp 29.145.520,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja



Perangkat Daerah. Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 32.818.573,90 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp.29.145.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1 ATK/Pakai Habis	1.371.020,00	1.785.000,00
2 Kertas dan Cover	4.710.000,00	8.925.000,00
3 Obat-obatan / Bahan Kimia	-	16.673.111,20
4 Bahan Komputer	3.105.000,00	1.365.000,00
5 Perabot Kantor	13.980.000,00	-
6 Bahan-Bahan Lainnya	-	1.946.462,70
7 Alat listrik	5.979.500,00	2.124.000,00
Jumlah	29.145.520,00	32.818.573,90

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang.

B. Aset untuk DikonsolidasikanRp70.305.607.152,00

Aset untuk dikonsolidasikan merupakan aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi. Aset untuk dikonsolidasikan Jumlah Aset untuk dikonsolidasikan 31 Desember 2024 sebesar Rp 70.305.607.152,00.

C. Aset Tetap.....29.552.168.221,55

Dalam laporan keuangan aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap ini mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, sedangkan Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tercantum dalam neraca Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Aset Tetap	48.154.694.683,00	47.112.837.501,00
Akumulasi Penyusutan	18.602.526.461,45	17.090.499.508,01
Aset Tetap Setelah Penyusutan	29.552.168.221,55	30.022.337.992,99

Pada tahun 2024 terdapat Mutasi bersih aset tetap sebesar Rp.1.041.857.182,00. Yang terdiri atas penambahan nilai aset tetap sebesar Rp.1.233.883.100,00 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp.192.025.918,00. Penambahan dan Pengurangan nilai aset tetap tersebut terdiri atas :
Penambahan nilai Aset Tetap terdiri atas:



NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penambahan aset tetap dari belanja modal	1.038.303.100,00
2	Penambahan aset tetap dari belanja barang jasa	13.980.000,00
3	Penerimaan aset dari donasi/hibah	-
4	Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain	181.600.000,00
5	Penambahan aset tetap yang belum tercatat	-
6	Reklasifikasi masuk dari akun lain yang tidak merubah total aset	-
7	Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset	-
8	Reklasifikasi masuk dari aset lainnya	-
9	Penambahan dari koreksi	-
	Jumlah	1.233.883.100,00

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penghapusan aset tetap	184.445.918,00
2	Pengurangan aset karena dihibahkan ke masyarakat	-
3	Pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi/Ekstra komp	-
4	Mutasi ke SKPD lain	-
5	Reklasifikasi keluar ke akun lain yang tidak mengubah jumlah total aset	-
6	Koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset	7.580.000,00
7	Rekapitulasi ke aset tetap lainnya	-
	Jumlah	192.025.918,00



Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
a. Penambahan Aset Tetap:							
1. Dari belanja	-	562.736.400,00	298.974.700,00	190.572.000,00	-	-	1.052.283.100,00
2. Dari Hibah	-	-	-	-	-	-	-
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-	181.600.000,00	-	-	-	-	181.600.000,00
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-	-	-	-	-	-	-
5. Reklasifikasi	-	-	-	-	-	-	-
6. Koreksi pembukuan	-	-	-	-	-	-	-
7. Dari dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
8. Validasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	744.336.400,00	298.974.700,00	190.572.000,00	-	-	1.233.883.100,00
b. Pengurangan Aset Tetap:							
1. Penghapusan aset tetap	-	-	-	-	-	-	-
2. Diberikan ke masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
3. Di bawah nilai kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi aset tetap	-	-	-	-	-	-	-
5. Rekalsifikasi aset lainnya	-	184.445.918,00	-	-	-	-	184.445.918,00
6. Koreksi pembukuan	-	7.580.000,00	-	-	-	-	7.580.000,00
7. Validasi lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	192.025.918,00	-	-	-	-	192.025.918,00



Berikut adalah penjelasan pos-pos aset tetap :

C.1 Tanah.....Rp. 2.948.911.742,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang tercatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut. Pada neraca Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2023 tercatat nilai tanah sebesar Rp. 2.948.911.742,00 sedangkan pada tahun 2024 nilai tanah tersebut tetap sebesar Rp.2.948.911.742,00.

C.2 Peralatan dan Mesin..... Rp. 14.012.130.778,00

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi pengolahan dan pemurnian, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi. Pada tahun 2023 aset tetap peralatan dan mesin pada neraca Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp. 13.459.820.296,00 sedangkan pada tahun 2024 nilai peralatan dan mesin tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp.14.012.130.778,00.



Penjelasan atas mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	13.459.820.296,00
Neraca awal SKPD	13.459.820.296,00
Penambahan Peralatan dan Mesin	
1. Dari belanja	562.736.400,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	181.600.000,00
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	744.336.400,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat/Fihak ketiga lainnya	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi / Ekstra Komp	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi ke aset tetap	-
6 Reklasifikasi ke aset lainnya	184.445.918,00
7 Koreksi pembukuan	7.580.000,00
8 Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	192.025.918,00
Jumlah mutasi bersih	552.310.482,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2024)	14.012.130.778,00

Mutasi bersih peralatan dan mesin selama tahun 2024 sebesar Rp.552.310.482,00 diperoleh dari Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp.744.336.400,00 dan Pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp. 192.025.918,00.



Penambahan nilai Peralatan dan Mesin terdiri atas:

NO	URAIAN	Belanja Modal	Belanja Barang Jasa
1	Alat Kantor	64.685.000,00	-
2	Alat Rumah Tangga	302.607.000,00	13.980.000,00
3	Alat Studio	30.060.000,00	-
4	Unit Alat Laboratorium	41.640.000,00	-
5	Komputer Unit	61.950.000,00	-
6	Peralatan Komputer	47.814.400,00	-
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja	298.974.700,00	-
8	Jalan	190.572.000,00	-
	Jumlah	1.038.303.100,00	13.980.000,00

Sedangkan Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin terdiri atas:

NO	URAIAN	Reklas ke Aset Lainnya	Koreksi
1	Alat Kantor	13.869.944,00	-
2	Alat Rumah Tangga	7.552.590,00	7.580.000,00
3	Alat Studio	26.750.000,00	-
4	Unit Alat Laboratorium	-	-
5	Komputer Unit	112.098.384,00	-
6	Peralatan Komputer	24.175.000,00	-
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-
8	Jalan	-	-
	Jumlah	184.445.918,00	7.580.000,00

C.3 Gedung dan Bangunan Rp. 26.608.700.834,00

Definisi dari gedung dan bangunan menurut UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pada tahun 2023 aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp. 26.309.726.134,00 sedangkan pada tahun 2024 nilai gedung dan bangunan tersebut naik menjadi Rp. 26.608.700.834,00.



Penjelasan atas mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	26.309.726.134,00
Neraca awal SKPD	26.309.726.134,00
Penambahan Gedung dan Bangunan:	
1. Dari belanja	298.974.700,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	298.974.700,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat/Fihak ketiga lainnya	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	298.974.700,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2024)	26.608.700.834,00

Mutasi bersih gedung dan bangunan selama tahun 2024 sebesar Rp.298.974.700,00 diperoleh dari Belanja Modal yang terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.298.974.700,00.

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... Rp. 4.417.526.329,00

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut PSAP nomor 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi/jenis Jalan, Irigasi, dan



Jaringan ini antara lain Jalan dan Jembatan, bangunan air, instalasi, dan Jaringan. Pada tahun 2024 aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp.4.417.526.329,00.

Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2023)	4.226.954.329,00
Mutasi Bersih akibat perubahan SOTK	-
Neraca awal SKPD	4.226.954.329,00
Penambahan Jalan, Jaringan, Irigasi:	
1. Dari belanja	190.572.000,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	190.572.000,00
Pengurangan Jalan, Jaringan, Irigasi:	
1 Penghapusan aset tetap	
2 Dihilangkan ke masyarakat/Fihak ketiga lainnya	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	190.572.000,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2024)	4.417.526.329,00

Mutasi bersih jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2024 tetap sebesar Rp.190.572.000,00.



C.5 Aset Tetap Lainnya..... Rp 167.425.000,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/budaya/olahraga. Pada tahun 2023 aset tetap lainnya pada neraca Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp. 167.425.000,00 sedangkan pada tahun 2024 nilai aset tetap lainnya tersebut tetap menjadi sebesar Rp. 167.425.000,00.

NO	NAMA ASET	JUMLAH
1	Alat Peraga Kesenian	31.160.000,00
2	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	-
3	Tanaman	136.265.000,00
	TOTAL	167.425.000,00

C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan..... Rp 0,00

Dinas Pertanian bukan merupakan SKPD pengelola Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.7 Akumulasi Penyusutan..... Rp 18.602.526.461,45

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.17.090.499.508,01 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp.18.602.526.461,45. Akumulasi aset tetap merupakan contra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Pada tahun 2015 berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis AkruaI perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif penyusutan dilakukan secara tahunan (per tahun), selanjutnya pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Perhitungan penyusutan aset tetap berubah menjadi secara bulanan (per bulan). Dengan perubahan tersebut maka akan terjadi selisih nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 (audited) yang dihitung per tahun dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 yang dihitung per bulan. Selisih tersebut telah dilakukan penyesuaian dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 khususnya dalam penyusunan neraca awal untuk akun akumulasi penyusutan.



Adapun rincian dari akumulasi penyusutan Aset Tetap per SKPD adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12- 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan Awal	Beban Penyusutan Tahun 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12-2024
1	Peralatan dan Mesin	10.994.794.457,12	2.845.918,00	738.202.917,80	11.730.151.456,92
2	Gedung dan Bangunan	3.896.419.506,16	-	497.690.210,11	4.394.109.716,27
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.199.285.544,72	-	278.979.743,33	2.478.265.288,25
4	Aset Tetap Lainnya				
Jumlah		17.090.499.508,00	2.845.918,00	1.514.872.871,44	18.602.526.461,44

Selain aset tetap sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat koreksi akumulasi penyusutan awal sebesar Rp 2,845.918,00 yang berasal dari selisih antara Reklas Mutasi Masuk sebesar Rp 181.600.000,00 dan Reklas Keluar Aset Lainnya sebesar Rp 184,445.918,00

D. Aset Lainnya.....Rp.29.178.132,95

Aset lainnya merupakan asset Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, atau dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya tahun 2023 sebesar Rp. 29.178.132,95, sedangkan pada tahun 2024 tetap sebesar Rp.29.178.132,95 yang terdiri atas tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi aset lain-lain dengan rincian saldo sebagai berikut:

<i>Aset Lainnya:</i>	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain	680.475.126,00	496.029.208,00
Akumulasi Aset Lain-lain	(651.296.993,05)	(466.851.075,05)
	29.178.132,95	29.178.132,95

Aset Tidak BerwujudRp. 0,00

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa yang akan datang.

Pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan untuk aset tidak berwujud yang telah tercatat di neraca sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dilakukan amortisasi (penyusutan), hal ini karena seluruh asset tidak berwujud yang telah tercatat tidak diketahui masa manfaatnya baik masa



manfaat yang berkaitan dengan harapan entitas untuk menggunakan aset tidak berwujud tersebut maupun faktor hukum atau faktor ekonomis yang membatasinya seperti masa manfaat berdasarkan dokumen perjanjian. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 pada tahun 2024 tetap sebesar Rp.0,00.

Aset Lain-LainRp. 680.475.126,00

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud dan kemitraan dengan pihak ketiga. Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain, dimana aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 496.029.208,00 dan pada Tahun 2024 tetap sebesar Rp.680.475.126,00 . Aset lain-lain ini adalah merupakan aset dalam kondisi rusak berat yang telah diajukan usulan penghapusannya.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-LainRp 651.296.993,05

Penyusutan dalam aset ini adalah alokasi sistematis yang dapat disusutkan dari suatu aset selama usia manfaatnya. Jumlah nilai setelah dialokasikan biasanya disalurkan untuk periode-periode yang menerima manfaat dari aset lain-lain tersebut. Akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 651.296.993,05.

5.1.8. Kewajiban.....Rp.35.904.318,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 152.422.216,00. Kewajiban tersebut mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi sebesar Rp.35.904.318,00 yang terbagi kedalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana rincian berikut:

Kewajiban:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1 Kewajiban Jangka Pendek	35.904.318,00	152.422.216,00
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	<u>35.904.318,00</u>	<u>152.422.216,00</u>

1. Kewajiban Jangka Pendek.....Rp.35.904.318,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar Rp. 152.422.216,00 sedangkan pada tahun 2024 menjadi sebesar



Rp.35.904.318,00 yang meliputi Utang Belanja Lainnya sebagaimana rincian berikut:

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja	152.422.216,00	41.695.092,00
	152.422.216,00	41.695.092,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Utang Belanja.....Rp.152.422.216,00

Jumlah Utang belanja pada neraca tahun 2024 sebesar Rp. 35.904.318,00,00. Pada akhir tahun 2023 utang belanja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebesar Rp.152.422.216,00 diperoleh dari Belanja Barang & Jasa sebesar Rp. 35.904.318,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	UTANG BELANJA	2024	2023
1	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon	70.934,00	75.984,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	1.556.500,00	244.000,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	24.749.938,00	26.737.199,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor - Kawat/Faksimili/Internet/TV	9.526.946,00	9.404.180,00
5	Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	106.680.000,00
6	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	5.685.653,00
7	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	3.595.200,00
	Jumlah	35.904.318,00	152.422.216,00

2. Kewajiban Jangka Panjang.....Rp0,00

Kewajiban jangka panjang-utang dalam negeri adalah kewajiban lainnya yang bukan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, adapun saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar nihil.

5.1.9. Ekuitas.....Rp.29.574.587.556,50

Ekuitas adalah menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar Rp. 29.931.912.483,84 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp.29.574.587.556,50. Penjelasan lebih lanjut mengenai ekuitas diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

SKPD Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008*. Adapun kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan **SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan** adalah sebagai berikut :

4.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

a. Kedudukan.

SKPD DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah (**Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008**) yang dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok.

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, melaksanakan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, ketatausahaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

c. Fungsi.

Fungsi untuk masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut :

1. S e k r e t a r i s.

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;



- d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan

- a. Penyusunan program kerja di bidang usaha pertanian dan sumberdaya manusia;
- b. Pelaksanaan pengelolaan ketenagakerjaan dan kelembagaan tani, kelembagaan penyuluhan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pelaksanaan penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi Sumberdaya Manusia Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kursus/latihan yang dikelola petani;
- f. Penyusunan, perbanyakan dan penyebarab materi, metoda dan sistem penyuluhan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, sarana dan prasarana penyuluhan;
- h. Pelaksanaan pembinaan kepada Penyuluh Pertanian bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. Pelaksanaan pembinaan penanganan paska panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;



- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- l. Penyusunan program kerja di bidang sarana dan prasarana pertanian;
- m. Pembinaan dan pengembangan pengelolaan lahan dan air;
- n. Pembinaan dan pengelolaan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan bencana alam;
- o. Pembinaan dan pengembangan penggunaan pupuk dan pestisida;
- p. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan kredit pertanian;
- q. Pembinaan dan pengelolaan serta pengembangan alat dan mesin pertanian; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya,

3. Bidang Tanaman Pangan.

- a. Penyusun program di bidang tanaman pangan;
- b. Pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. Pembinaan pengembangan dan pengawasan, penangkaran benih/bibit, peredaran dan penggunaan benih/bibit tanaman pangan;
- d. Pembinaan penerapan sistem informasi, standar mutu benih dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan;
- e. Pemantauan dan pengawasan ijin usaha tanaman pangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Hortikultura.

- a. Penyusunan program kerja bidang hortikultura;
- b. Pembinaan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
- c. Pembinaan dan pengawasan balai benih dan penangkaran benih/bibit dan produksi benih, perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih hortikultura;



- d. Pengembangan system informasi perbenihan, identifikasi dan pengembangan hortikultura;
- e. Pembinaan/bimbingan penerapan sistem informasi, standar teknis dan mutu benih, pedoman perbenihan dan pola tanam hortikultura;
- f. Bimbingan peningkatan mutu hasil dan peredaran mutu benih hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT).

- a. Penyusunan program kerja UPT;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan pembinaan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan petani, pembinaan pengendalian hama dan penyakit, pemantauan, monitoring bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, administrasi, umum, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPT;
- e. Penyiapan program pengembangan bahan tanaman, pembinaan penangkaran benih, pembibitan dan pemeliharaan pohon induk;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pertanian terdiri dari 3 Sub Bagian, 3 Bidang, 21 BPP, selengkapnya sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| A. Plt. Kepala Dinas Pertanian | : | AMIN NUR HATTA, S.Sos. |
| B. Sekretaris | : | KUKUH PRASETYO
R,SH,MM. |
| - Kasubag Umum | : | PROBO WINDASTUTI , SE,
AKT. |
| - Kasubag Perencanaan | : | WIWIT RAHMAWATI,STP. |
| - Kasubag Keuangan | : | SETYO WICAKSONO, SE,
MM. |
| C. Kepala Bidang Pangan | : | PUJIYONO,SP. |
| - Sub. Koordinator Produksi Sereal | : | SRI IDAYATUN ,SP |



-
- Sub. Koordinator Aneka : ANGGORO
Kacang dan Umbi : SULISTIYONO,STP
 - Sub.Koordinator : PURWANTO, SP
Pengolahan dan Pemasaran
Tanaman Pangan
 - D. Kepala Bidang Penyuluhan, : WAKID MUTOWAL, STP, MSc
Sarana dan Prasarana
Pertanian
 - Sub. Koordinator Lahan, : DWI KHRISTANTO, STP
Irigasi dan Pembiayaan
 - Sub.Koordinator Pupuk, : SUYATNO, STP
Pestisida dan Alat Mesin
Pertanian
 - Sub.Koordinator : ANGGA PRASETYA
Penyuluhan : ADHIPUTRA, SP
 - E. Kepala Bidang Perkebunan : DIAN YUNIAWATI, SP,M.Eng
 - Sub Koordinator Prod dan : WIWIK KUNCORONINGRUM,
Pemasaran Tanaman : SP
Perkebunan Semusim
 - Sub Koordinator Prod dan : SUGIYONO, SP
Pemasaran Tanaman
Perkebunan Tahunan
 - Sub Koordinator :
Perlindungan dan
Perbenihan Tan.
Perkebunan
 - F. Kepala Bidang Hortikultura : NUR WIDIASTUTI , SSI, MSI
 - Sub Koordinator Prod : CAHYO MULYADI,SP
Aneka Sayur, Tanaman
Hias dan Biofarmaka
 - Sub Koordinator Tanaman : RAHMADDONO
Buah Buahan
 - Kasi Pengolahan dan :
Pemasaran Hortikultura
 - G. **BBP** dan Koordinator BPP
Kecamatan
 - Kepala Balai Benih : SURONO, STP
Pembenihan
 - Kepala **UPT** Laboratorium : Ir. POERBORINI S
 - KoordinatorKec. : HARMOKO , SP
Kedungjati
 - KoordinatorKec. : HENDROWATI
Karangrayung
 - KoordinatorKec. : TOTOK SURYANA , SP
Penawangan
 - Koordinator Kec. Toroh : SITI NUR SOFIAH M,SP
 - Koordinator Kec. Geyer : HERMAN WIDODO,SP
 - Koordinator Kec. : LANGGENG SUSANTO, SP
Pulokulon
 - Koordinator Kec. : SRI MULYADI, SP,MP
Kradenan
 - Koordinator Kec. Gabus : SLAMET PRAKOSO,SP



- Koordinator Kec. : KISWATI, SP
Ngaringan
- Koordinator Kec. Wirosari : ISLAN HASTO WASONO, SP
- Koordinator Kec. : IRUL HARTANTO, SP
Tawangharjo
- Koordinator Kec. : SISWOYO
Grobogan
- Koordinator Kec. : IKHSAN SAKSONO,A.Md
Purwodadi
- Koordinator Kec.Brati : ARIFA NOVIANTI, SP
- Koordinator Kec. Klambu : LAILI ZUMROTUL
HASANAH, S.P
- Koordinator Kec. Godong : SUPARNO , SP
- Koordinator Kec. Gubug : IMAM KUNCORO , SP
- Koordinator Kec. : AJI PRIYONOTO, SP
Tegowanu
- Koordinator Kec. : ARMEINA YUKA
Tanggungharjo MARLIANITA S,SP

Data Aparat Sipil Negara / ASN (PNS dan PPPK)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Dinas Pertanian sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 50 orang terdiri dari:

1. Pegawai Golongan I sebesar 0 orang
2. Pegawai Golongan II sebesar 8 orang
3. Pegawai Golongan III sebesar 34 orang
4. Pegawai Golongan IV sebesar 8 orang

Rincian PNS sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Golongan/Ruang, Eselon, Tenaga Fungsional, dan Staf di lingkungan Dinas Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Tahun 2024

Golongan	ESELON					Fungsional	Struktural	Total
	I	II	III	IV	V			
IV/e								
IV/d								
IV/c								
IV/b		1	0			0	1	1
IV/a			4	3		0	7	7
Jumlah Gol. IV		1	4	3		0	8	8
III/d			0	13	0	13	0	13
III/c			0	4	0	4	0	4
III/b				7	0	7	0	7
III/a				0	10	1	9	10
Jumlah Gol. III			0	24	10	25	9	34
II/d					1	1	0	1
II/c					7	7	0	7
II/b					0	0	0	0



II/a					8	8	0	8
Jumlah Gol. II					8	8	0	8
I/d								
I/c								
I/b								
I/a								
Jumlah Gol. I								
JUMLAH PNS		1	4	27	18	33	17	50

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada lingkungan Dinas Pertanian sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 81 orang terdiri dari:

1. Pegawai Golongan I sebesar 0 orang,
2. Pegawai Golongan II sebesar 10 orang
3. Pegawai Golongan III sebesar 30 orang
4. Pegawai Golongan IV sebesar 0 orang

Rincian PPPK sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Golongan/Ruang, Eselon, Tenaga Fungsional, dan Staf di lingkungan Dinas Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Data PPPK Dinas Pertanian Tahun 2024

Golongan	ESELON					Fungsional	Struktural	Total
	I	II	III	IV	V			
IV/e								
IV/d								
IV/c								
IV/b								
IV/a								
Jumlah Gol. IV								
III/d								
III/c								
III/b								
III/a					70	70		70
Jumlah Gol. III					70	70		70
II/d								
II/c								
II/b					11	11		11
II/a								
Jumlah Gol. II					11	11		11
I/d								



Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

I/c								
I/b								
I/a								
Jumlah Gol. I								
JUMLAH PNS					81	81		81



BAB V PENUTUP

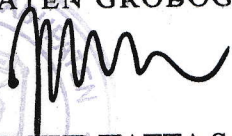
Dari uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, II, III dan IV, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar pencapaian pendapatan sebesar Rp.286.040.000,00 lebih besar Rp.3.040.000,00 atau 101,07 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.283.000.000,00.
2. Ikhtisar pencapaian belanja sebesar Rp.70.591.647.152,00 lebih rendah Rp.2.152.671.848,00 atau 97,04 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.72.744.319.000,00.
3. Berdasarkan realisasi Pendapatan sebesar Rp.286.040.000,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp.70.591.647.152,00 maka terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp.61.005.800.103,00 atau yang disebut Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA 2024.
4. Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional untuk Pendapatan-LO sebesar Rp. 286.040.000,00, Beban Operasional sebesar Rp.70.948.972.079,34 dan Defisit Non Operasional sebesar Rp. 0,00, sehingga diperoleh defisit-LO sebesar Rp.70.662.932.079,34.
5. Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp.29.931.912.483,84, Defisit-LO sebesar Rp. 70.662.932.079,34, kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 70.305.607.152,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp.29.574.587.556,50.
6. Pada Neraca per 31 Desember 2024, jumlah Aset sebesar Rp.29.610.491.874,50, Jumlah Kewajiban sebesar Rp.35.904.318,00 dan jumlah Ekuitas sebesar Rp. 0,00. Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.29.610.491.874,50.

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan sampai dengan akhir tahun 2024 ini tidak luput dari kekurangan. Hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar kekurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Purwodadi, 31 Desember 2024
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN


AMIN NUR HATTA, S.Sos.

NIP. 19691223.199003.1.001